

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hingga akhir abad ke-20, kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang signifikan secara global. Walaupun kelihatannya isu kemiskinan tidak akan pernah hilang di dunia ini, pada September 2015, komunitas internasional merespons dengan mengadakan pertemuan di markas PBB di New York, Amerika Serikat, untuk menyetujui dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi beban yang besar, terutama karena kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya semakin membesar. Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan sesuai dengan deklarasi SDGs. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kondisi sosial dan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 7,38 persen pada Maret 2020, meningkat menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai 12,82 persen pada Maret 2020, meningkat menjadi 13,20 persen pada September 2020.

Data terbaru mengenai tingkat kemiskinan ini menimbulkan tantangan yang lebih sulit dan kompleks bagi pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis yang melibatkan berbagai dimensi, sehingga tidak dapat diatasi dengan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan strategi yang lebih

holistik dan terpadu. Upaya percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menjadi faktor kunci dalam menghadapi dampak pandemi yang berpotensi menimbulkan krisis berkelanjutan di tengah masyarakat.

Banyak keluarga miskin dan rentan miskin yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan, namun mereka tidak dapat mengakses layanan perlindungan sosial yang komprehensif. Kurangnya optimalisasi dalam pelayanan dan penanganan masalah sosial disebabkan oleh pemahaman yang masih bersifat sektoral dalam mengatasi masalah, yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan. Terdapat program pelayanan yang masih bersifat sektoral dan dijalankan secara terpisah-pisah oleh lembaga/institusi dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, berkelanjutan, dan terpadu oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta masyarakat. Melalui inovasi One Stop Services, pemerintah sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga miskin terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan penduduk yang miskin adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan melalui program Pusat Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari program ini adalah untuk

mengenali keluarga yang berada dalam kondisi miskin dan rentan, dan menghubungkan mereka dengan program Perlindungan Sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui program ini, layanan yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat disediakan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa atau kelurahan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya sistem layanan terpadu dan pusat koordinasi dari berbagai lembaga terkait, masyarakat tidak lagi mengalami hambatan birokrasi dalam mengakses berbagai layanan sosial yang diperlukan. Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki peran strategis sebagai koordinator dan kolaborator antarpihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) harus melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, berkelanjutan, dan terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat. Tugas dan kegiatan Puskesos harus sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, Puskesos juga harus memanfaatkan lembaga pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas berdasarkan standar pelayanan minimal bidang sosial di tingkatan daerah. Wilayah kerja Puskesos mencakup 56 Kelurahan dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) beroperasi di bawah kerangka hukum yang sama. Peran SLRT adalah untuk mengenali kebutuhan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan miskin, dan menghubungkannya dengan program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, SLRT juga membantu dalam mengidentifikasi keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat miskin dan rentan miskin, memberikan rujukan, serta memonitor penanganan keluhan tersebut untuk memastikan penanganan yang memadai. SLRT akan terintegrasi secara langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tugas dari Manajer SLRT adalah untuk mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi dari sekretariat SLRT di tingkat daerah, sementara Koordinator Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Puskesmas di tingkat desa atau kelurahan. Pentingnya integrasi yang baik dalam pelayanan dari SLRT dan Puskesmas, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa atau kelurahan, bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial yang terpadu dan berkualitas.

Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) merupakan salah satu cara pemerintah agar terciptanya pelayanan yang terintegrasi secara luas ke berbagai bidang, seperti bidang ekonomi kreatif, sosial, Kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Puskesmas juga menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan layanan sosial kepada penyelenggara

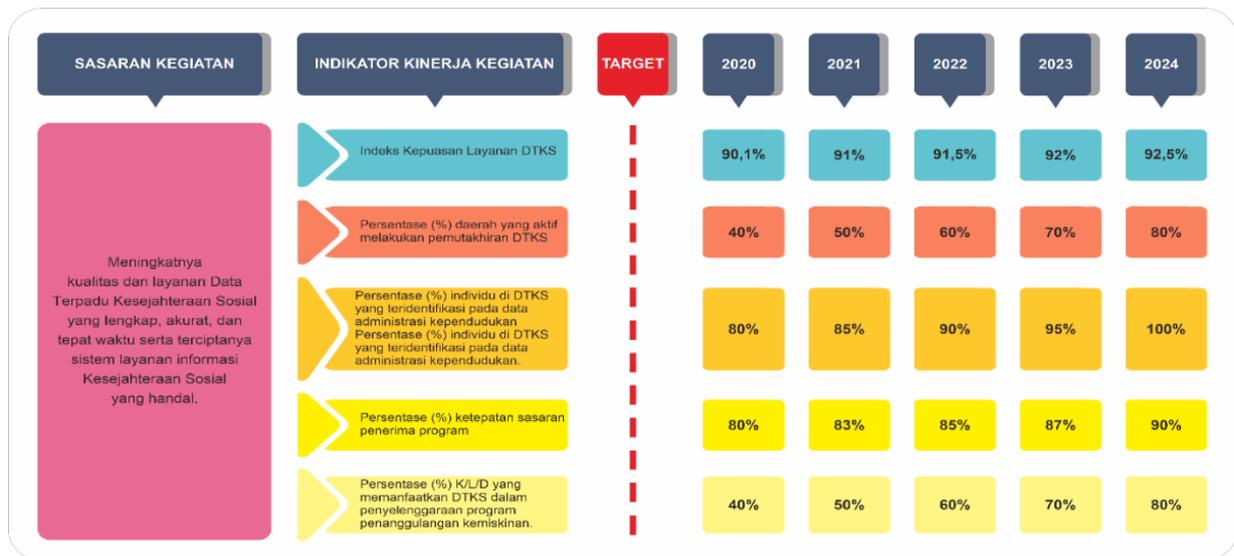
layanan secara langsung. Setiap individu ataupun rumah tangga dapat memanfaatkan layanan Puskesmas untuk mengakses informasi dan mengajukan keluhan yang terkait dengan program perlindungan sosial. Untuk pengaduan bantuan sosial, misalnya, masyarakat cukup datang ke sekretariat Puskesmas terdekat yang berada di setiap kelurahan. Keluhan akan ditangani oleh petugas Puskesmas dan dihubungkan dengan ragam layanan di berbagai organisasi perangkat daerah dan institusi terkait lainnya. Sehingga, dipastikan keluhan masyarakat tersebut dapat tertangani dengan baik sekaligus terpantau proses penanganannya.

Mengevaluasi program-program Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan keterjangkauan penerima manfaat. Selain itu, perlu meningkatkan keterpaduan antara penyelenggara program untuk menghindari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program sosial dan penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Puskesmas, perlu memperhatikan beberapa faktor, antara lain pengembangan kemampuan, sistem informasi, keahlian pelaksana, koordinasi, implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas kepada warga miskin dan rentan.

Sehubung dengan itu, maka Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan dalam Analisa Pencapaian Kinerja yang akan dilakukan mulai dari 2020 sampai dengan 2024 Dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlu dilakukan peningkatan yang signifikan agar data yang tersedia menjadi lengkap, akurat, dan

diperbaharui secara tepat waktu. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem layanan informasi kesejahteraan sosial yang handal guna memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak terkait.

**Gambar 1.1** Analisa Pencapaian Kinerja Pusat Data Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Sosial Republik Indonesia



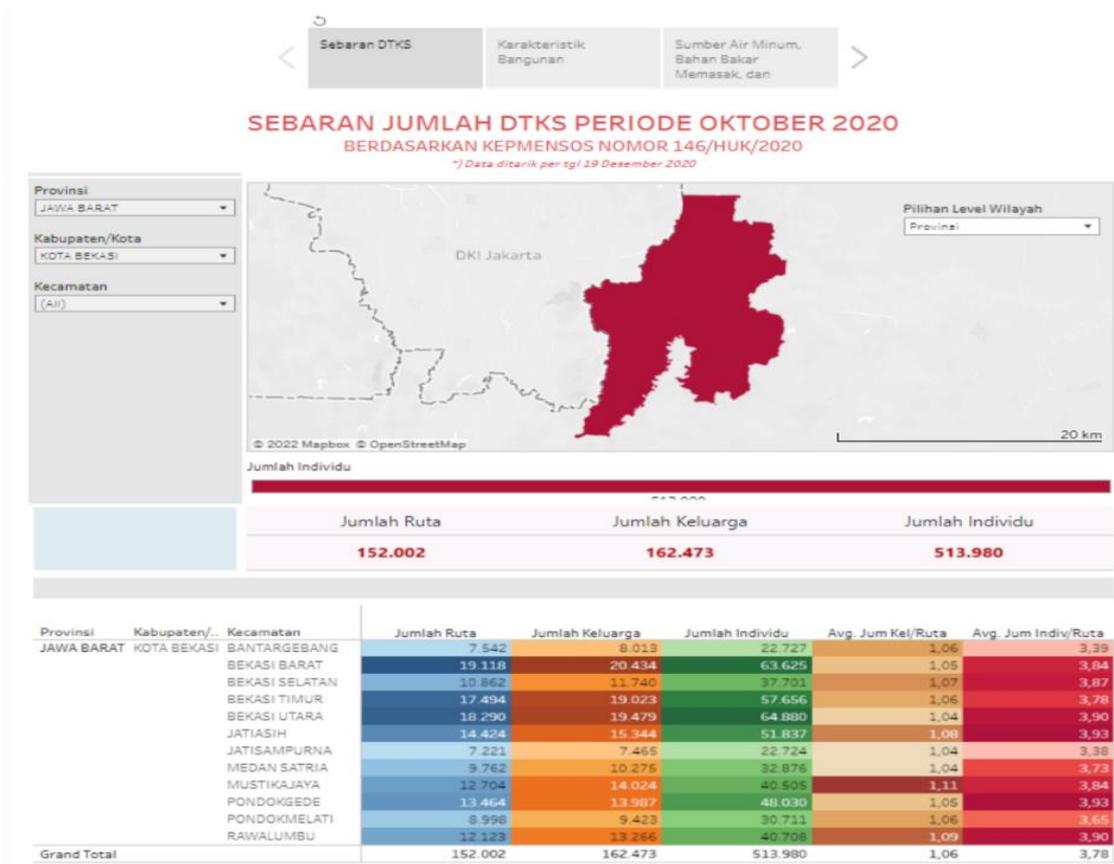
Sumber: <https://pusdatin.kemensos.go.id/analisa-kecapaian-kerja>

Berdasarkan Gambar 1.1 Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Analisa Pencapaian Kinerjanya menggunakan 5 indikator kinerja kegiatan ; 1) Indeks Kepuasan Layanan DTKS. 2) Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS. 3) Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi pada data administrasi kependudukan. 4) Persentase ketepatan sasaran penerima program. 5) Persentase K/L/D (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Analisis kinerja digunakan untuk mengevaluasi kemajuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan

dari analisis kinerja ini bukanlah untuk memberikan imbalan atau hukuman, namun sebagai alat komunikasi dan manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun penulis akan memaparkan data sebaran jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mulai dari tingkatan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada di Kota Bekasi, sebagai berikut :

**Gambar 1. 2** Sebaran Jumlah DTKS Periode Oktober 2020 Wilayah Kota Bekasi

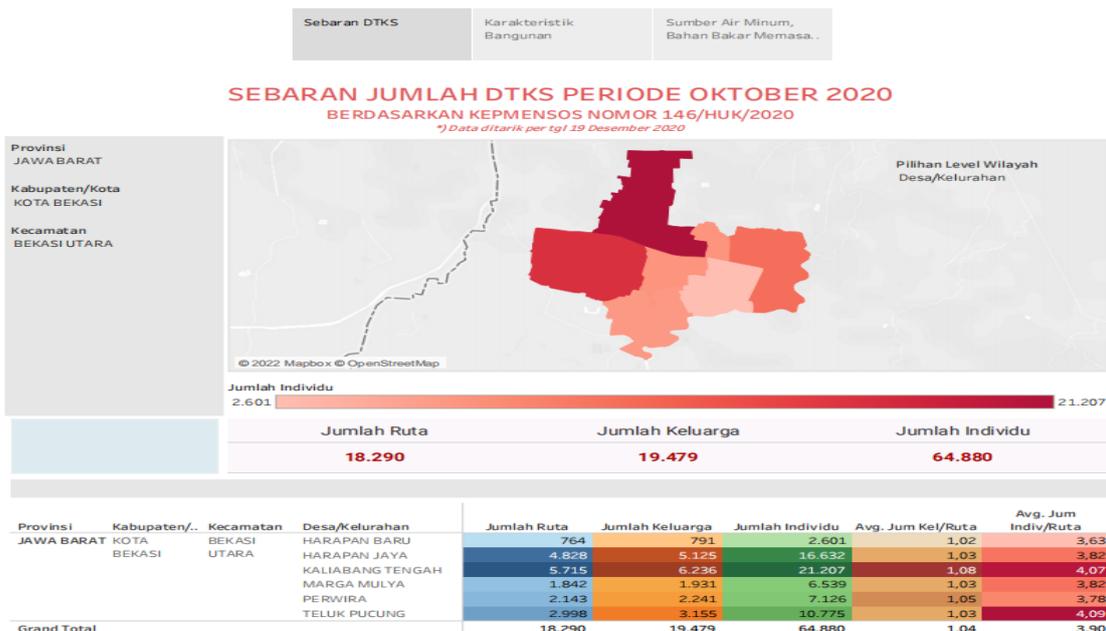


Sumber: Dashboard DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ([kemensos.go.id](http://kemensos.go.id))

Berdasarkan Gambar 1.2 Sebaran Jumlah DTKS Periode Oktober 2020 Wilayah Kota Bekasi yang terdiri dari 12 kecamatan Jumlah Ruta (Rumah Tangga) 152.002, Jumlah Keluarga 162.473, dan Jumlah Individu 513.980. Sebaran DTKS

paling banyak berada di Kecamatan Bekasi Barat dengan Jumlah Ruta (Rumah Tangga) 19.118, Jumlah Keluarga 20.434, dan Jumlah Individu 63.625 dengan total sebaran DTKS mencapai 103.177. Dan sebaran DTKS paling sedikit berada di Kecamatan Medan Satria dengan Jumlah Ruta (Rumah Tangga) 9.762, Jumlah Keluarga 10.275, dan Jumlah Individu 32.876 dengan total sebaran DTKS mencapai 32.876. Sedangkan Kecamatan Bekasi Utara berada pada posisi ke-2 dengan jumlah Ruta (Rumah Tangga) 18.290, Jumlah Keluarga 19.476, dan Jumlah Individu 64.880 dengan total sebaran DTKS mencapai 102.649. Gambar diatas merupakan hasil sebaran DTKS Periode Oktober 2020 berdasarkan kecamatan yang tertinggi dan terendahnya di wilayah Kota Bekasi yang bersumber dari Dashboard DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (kemensos.go.id).

**Gambar 1. 3** Sebaran Jumlah DTKS Periode Oktober 2020 Wilayah Kecamatan Bekasi Utara



Sumber : Dashboard DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (kemensos.go.id)

Berdasarkan Gambar 1.3 Sebaran Jumlah DTKS Periode Oktober 2020 Wilayah Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri dari 6 kelurahan, Sebaran DTKS paling banyak berada di kelurahan Kaliabang Tengah dengan Jumlah Ruta (Rumah Tangga) 5.715, Jumlah Keluarga 6.236, dan Jumlah Individu 21.207 dengan total sebaran DTKS mencapai 33.158. Dan sebaran DTKS paling sedikit berada di Kelurahan Harapan baru dengan Jumlah Ruta (Rumah Tangga) 764, Jumlah Keluarga 791, dan Jumlah Individu 2.601 dengan total sebaran DTKS mencapai 4.156. Gambar diatas merupakan hasil sebaran DTKS Periode Oktober 2020 berdasarkan kelurahan yang tertinggi dan terendahnya di wilayah Kecamatan Bekasi Utara yang bersumber dari Dashboard DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (kemensos.go.id).

Dari pemaparan kedua gambar diatas peneliti bermaksud untuk membandingkan dengan wilayah dengan Sebaran DTKS dari yang tertinggi hingga terendah. Hal ini agar memudahkan peneliti dalam pengambilan *Sampling* pada lokasi yang dimaksud, serta dapat memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

Dengan demikian Puskesmas bukan berarti tidak terdapat masalah yang tidak berarti, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas harus dapat diperhatikan dengan mendetail. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi terkait dengan program tersebut. Puskesmas, sebagai bagian dari sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, baru dapat diimplementasikan secara nasional pada tahun 2016, meskipun sudah diatur sejak

tahun 2009. Kota Bekasi sendiri baru membuat Peraturan Wali Kota Bekasi No.73 Tahun 2020 tentang pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan.

Proses yang direncanakan dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi tentang sebuah program disebut evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan prasyarat untuk navigasi, definisi strategi, dan pengaturan program masa depan. Evaluasi proses implementasi program, dampak atau hasil yang dicapai, efektivitas, dan penggunaan hasil evaluasi yang berkonsentrasi pada program itu sendiri adalah semua tujuan evaluasi. Efek-efek setelah evaluasi digunakan untuk memutuskan apakah program akan dilanjutkan, harus diperbaiki, atau ditanggguhkan. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan program dan kebijakan masa depan yang terkait dengan program tersebut. Adaptasi dari Eko Putro Widyoko, 2009:6).

Untuk itu, penulis tertarik untuk melaksanakan riset atau penelitian dengan judul "Evaluasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Menengah Bawah Di Kecamatan Bekasi Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program dan menyediakan informasi kepada lembaga yang memiliki program tersebut agar dapat menganalisis ulang dan mengambil keputusan yang baik.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terdapat, antara lain:

1. Efektivitas: Tidak diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Efisiensi: Tidak diketahui sejauh mana efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
3. Kecukupan: Tidak diketahui apakah program Pusat Kesejahteraan Sosial telah memadai dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
4. Perataan: Tidak diketahui sejauh mana program Pusat Kesejahteraan Sosial telah berhasil mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di antara kelompok masyarakat di Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
5. Responsivitas: Tidak diketahui sejauh mana program Pusat Kesejahteraan Sosial dapat menanggapi perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul dari masyarakat di Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
6. Ketepatan: Tidak diketahui sejauh mana program Pusat Kesejahteraan Sosial telah mengidentifikasi masalah secara tepat dan merumuskan solusi yang sesuai di Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.

Adapun beberapa kesulitan atau hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial, tidak diketahui secara pasti kesulitan atau hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan program Pusat Kesejahteraan Sosial berdasarkan tugas, fungsi, dan sasaran di Kecamatan Bekasi Utara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada identifikasi masalah yang telah dilakukan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara?
2. Apa saja kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan program Pusat Kesejahteraan Sosial berdasarkan tugas, fungsi, dan sarasanya di Kecamatan Bekasi Utara?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara dengan tujuan untuk memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan tersebut?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, dapat diperoleh beberapa hasil yang diinginkan sebagai tujuan penelitian, antara lain:

1. Menganalisis evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bekasi Utara.
2. Menganalisis kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan program Pusat Kesejahteraan Sosial berdasarkan Tugas, fungsi, dan sarasanya di Kecamatan Bekasi Utara.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan

Bekasi Utara dengan tujuan untuk memudahkan warga untuk mendapatkan Pelayanan tersebut.

## **1.5 Signifikan Penelitian**

Berdasarkan studi sebelumnya, penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua aspek, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### **1.5.1 Signifikan Akademik**

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang dikumpulkan, peneliti menunjukkan minat terhadap isu-isu yang terkait Evaluasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Bekasi Utara. Peneliti sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti adalah *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (Slrt) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat*) ditulis oleh Niluh Putri Susanti di publikasikan dalam Jurnal, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami evaluasi implementasi SLRT, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan merumuskan strategi yang relevan. Penelitian ini mengadopsi teori evaluasi William N. Dunn sebagai landasan teoritisnya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis ASOCA.

Rujukan Kedua dari penelitian yang berjudul *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten* ditulis oleh Rah Adi Fahmi Ginanjar, Sugeng Setyadi, Umayatu Suiroh di publikasi dalam Jurnal Ilmu Ekonomi 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten serta mengidentifikasi wilayah-wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami tingkat

kemiskinan yang tinggi serta permasalahannya dalam berbagai sektor. Pendekatan analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini.

Rujukan Ketiga dari penelitian yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan* ditulis oleh Reza Fachrudin di publikasi dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2015. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti alokasi anggaran, mekanisme pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat.

Rujukan Keempat dari penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo* Ditulis Oleh Asna Aneta di publikasi dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka kerjanya. Dalam pengumpulan data, teknik wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) digunakan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah diimplementasikan dengan mematuhi langkah-langkah kebijakan P2KP.

Rujukan Kelima dari penelitian yang berjudul *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang* ditulis oleh Agus Nazaruddin, Muhammad Mudjib Mustafin, Humaidah Muafiqie di publikasi dalam Jurnal Of

Public Power 2017. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara tatap muka. Pemilihan narasumber atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan sampel purposive, yaitu melalui pendekatan two stage cluster random sampling, yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan masalah penelitian. Proses pemilihan sampel dilakukan dalam dua tahap.

Rujukan Keenam dari penelitian yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan* ditulis oleh Sujana Royat, di publikasi dalam Jurnal 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan mengajukan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi

Rujukan Ketujuh dari penelitian yang berjudul *Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya* ditulis oleh Nano Prawoto, di publikasi dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2009: 56 - 68. Dalam ulasan ini, metodologi subjektif digunakan dengan strategi assortment informasi seperti pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Rujukan Kedelapan dari penelitian yang berjudul *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali* ditulis oleh I G W.

Murjan Yesa, di publikasi dalam Jurnal Ekonomi Sosial. Wawancara, pengamatan dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa kepentingan publik sangat penting untuk mitigasi kebutuhan yang efektif.

Rujukan Kesembilan dari penelitian yang berjudul *Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang)* ditulis oleh Munawar Noor, di publikasi dalam Jurnal Serat Acitya. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNPM di Kota Semarang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan dan evaluasi program.

Rujukan Kesepuluh Dari Penelitian Yang Berjudul *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan* Ditulis Oleh Ishartono & Santoso Tri Raharjo, Di Publikasi Dalam Jurnal Social Work Jurnal. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai kesimpulan, penulis menekankan pentingnya penggunaan SDGs sebagai kerangka kerja yang holistik dan kolaboratif dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan

### **1.5.2 Signifikan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menengah bawah dengan program Pusat Kesejahteraan Sosial. Serta diharapkan dapat memonitoring dan mengevaluasi Puskesmas dari perspektif masyarakat demi tercapainya pelayanan yang terintegritas langsung dengan bidang-bidang terkait.

Penelitian dan publikasi jurnal merupakan salah satu aspek penting dalam dunia akademik. Dengan melakukan penelitian, kita dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama dalam penanggulangan masalah sosial, seperti kemiskinan. Penelitian yang dilakukan secara akademik akan menjadikan hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.

Publikasi jurnal merupakan langkah penting untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada para akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Jurnal yang diterbitkan secara resmi dapat menjadi referensi bagi peneliti dan pembaca lainnya untuk mengetahui hasil penelitian terbaru dalam bidang tertentu. Selain itu, publikasi jurnal juga dapat meningkatkan reputasi peneliti dan institusi yang terlibat dalam penelitian.

Dalam melakukan penelitian dan publikasi jurnal, diperlukan kerja keras dan dedikasi tinggi. Peneliti harus mampu merancang penelitian dengan baik, melakukan analisis data yang tepat, serta menyajikan hasil penelitian secara jelas dan sistematis. Publikasi jurnal juga mengharuskan penulis untuk mematuhi standar-standar tertentu, seperti etika penulisan dan penggunaan referensi yang benar.

Dalam dunia akademik, penelitian dan publikasi jurnal juga dapat menjadi faktor penentu dalam mendapatkan pengakuan dan penghargaan, seperti gelar akademik, hibah penelitian, dan pengakuan internasional. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian dan publikasi jurnal yang baik dan berkualitas.

### **1.5.3 Manfaat Praktis**

- a. memberikan analisis berupa pemikiran bagi Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi dalam upaya mengatasi beberapa masalah yang peneliti rumuskan dalam rumusan masalah penelitian dan peneliti mengharapkan bisa berguna dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai peningkatan kualitas pelayanan public yang ada di Kota Bekasi khususnya pada bidang sosial kemasyarakatan.

### **1.5.4 Manfaat Teoritis**

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat yang berarti, terutama dalam lingkungan akademik, terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada tahap penulisan ini, literatur-literatur yang telah dikumpulkan akan diolah dengan cara mengedit kata atau kalimatnya agar sesuai dengan alur penulisan. Tujuan dari penyesuaian tersebut adalah untuk memastikan bahwa pembahasan yang dihasilkan bersifat sistematis, sementara tetap mempertahankan maksud dan tujuan awal penulisan.

Metode analisis deskriptif, juga dikenal sebagai data deliniasi dan fakta terkait, akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil

pameran di perpustakaan. Dalam komposisi ini, prosedur pemeriksaan informasi akan mencakup pengesahan emisi, strategi assortment bahan referensi, serta pencarian data yang terkait dengan pengolahan dan penyelidikan material referensi. Sementara mencoba mengatasi masalah yang tercatat sebagai salinan keras, pencipta akan memberikan ilustrasi saran elektif atau ide (sosiasi) sebagai akhir dari konsekuensi pemeriksaan masalah yang akhirnya memutuskan proposisi elektive dalam berpikir kritis.

Kerangka konseptual berikut telah dikembangkan oleh peneliti untuk penulis studi ini untuk memfasilitasi persiapan:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang, signifikansi, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan literatur sebelumnya.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjelaskan teori tentang Evaluasi Program, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik, Program, dan Kesejahteraan Sosial. Dan tentunya peneliti memberikan kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan, sumber Data, metode pengumpulan data, metode pemrosesan data, paradigma penelitian, dan desain penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang analisis hasil pengolahan data dan pembahasan evaluasi program pusat kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menengah kebawah di Kecamatan Bekasi Utara.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini terdapat rangkuman singkat dan terperinci yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan. Penulis juga merekomendasikan penelitian masa depan yang dapat mengawasi sumbangan dalam bidang ini, baik dari segi teoritis maupun praktis. Seringkali, saran praktis memberikan manfaat dalam pengembangan aspek praktis maupun teoritis.